

Indonesia Darurat Kelas Menengah: Ketika Fenomena "Mantab" (Makan Tabungan) Menjadi Sinyal Bahaya Ekonomi

Zahra Widad Salma

KSEI LiSEnSi UIN Jakarta

Article Info	ABSTRACT
<p>Article history:</p> <p>Give Your Opinion (November)</p>	<p>Fenomena "Mantab" (Makan Tabungan) yang melanda kelas menengah Indonesia, sebuah kondisi di mana simpanan digunakan untuk membiayai kebutuhan hidup sehari-hari akibat penurunan daya beli yang sistematis. Berdasarkan data Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan Mandiri Spending Index (MSI), terjadi perlambatan signifikan pada tabungan di bawah Rp100 juta, yang kontras dengan pertumbuhan simpanan nasabah kaya, menandakan ketimpangan likuiditas yang nyata. Penulis mengidentifikasi faktor pendorong utama fenomena ini, meliputi stagnasi pendapatan riil di tengah lonjakan biaya pendidikan dan kesehatan, beban ganda generasi <i>sandwich</i>, serta pergeseran tenaga kerja ke sektor <i>gig economy</i> yang minim perlindungan. Tulisan ini juga mengkritik kebijakan fiskal yang menempatkan kelas menengah sebagai "sapi perah" pajak tanpa jaring pengaman sosial yang memadai. Guna mencegah ancaman <i>Middle Income Trap</i> dan perlambatan ekonomi, artikel ini merekomendasikan reformasi pajak yang berkeadilan, pengendalian inflasi non-makanan, serta formalisasi lapangan kerja.</p>
<p>Keywords:</p> <p><i>Fenomena Mantab (Makan Tabungan), Kelas Menengah, Daya Beli, Kebijakan Fiskal, Middle Income Trap</i></p>	
<p>Editor:</p> <p>Ihsan Faris Kurnia Faculty of Economics and Business</p>	

PENDAHULUAN

Merasa Selama bertahun-tahun, narasi besar ekonomi Indonesia selalu bertumpu pada satu pilar utama: konsumsi rumah tangga. Dengan populasi lebih dari 270 juta jiwa, mesin pertumbuhan ekonomi kita digerakkan oleh belanja masyarakat, bukan semata ekspor atau investasi. Di garda terdepan mesin ini berdiri "Kelas Menengah", kelompok masyarakat yang selama ini dianggap sebagai simbol kesuksesan pembangunan, penyangga stabilitas politik, dan konsumen paling loyal bagi industri nasional. Namun, di balik angka pertumbuhan ekonomi makro yang masih terjaga di kisaran 5%, ada "badai sunyi" yang sedang meluluhlantakkan fondasi keuangan jutaan keluarga Indonesia. Fenomena ini tidak ditandai dengan antrean beras miskin yang mengular atau kerusakan sosial, melainkan ditandai dengan diamnya saldo rekening yang terus menyusut.

Kita mengenalnya dengan istilah "Mantab" atau Makan Tabungan. Ini adalah kondisi di mana pendapatan bulanan tidak lagi cukup untuk membiayai kebutuhan hidup sehari-hari, sehingga seseorang terpaksa menggerus simpanan masa lalunya untuk bertahan hidup hari ini. Fenomena Mantab bukan sekadar cerita sedih di media sosial tentang Gen Z yang gagal menabung karena gaya hidup kopi susu. Ini adalah gejala penyakit kronis ekonomi: penurunan daya beli (*purchasing power*) yang sistematis. Ketika kelas menengah mulai memakan tabungan mereka bukan untuk liburan atau membeli aset, melainkan untuk membayar listrik, uang sekolah, dan belanja dapur, maka lampu kuning tanda bahaya bagi ekonomi nasional telah menyala terang. Seringkali, penyangkalan (*denial*) muncul dengan argumen bahwa "mal masih ramai" atau "konser musik selalu *sold out*". Namun, observasi visual sesaat tidak bisa menggugurkan fakta statistik yang valid. Mari kita lihat data yang berbicara jujur tentang kondisi dompet rakyat.

Indikator paling menonjol datang dari data Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan Mandiri Spending Index (MSI). Sepanjang tahun 2023 hingga 2024, terjadi tren yang mengkhawatirkan: pertumbuhan tabungan nasabah dengan saldo di bawah Rp100 juta melambat drastis, bahkan di beberapa titik mengalami kontraksi (negatif). Kelompok saldo di bawah Rp100 juta adalah proksi paling akurat untuk menggambarkan kelas menengah-bawah (*aspiring middle class*). Sebaliknya, simpanan nasabah tajir (tier saldo di atas Rp5 miliar) terus tumbuh subur. Kesenjangan ini menunjukkan satu hal: uang beredar tidak menetes ke bawah, tetapi mengendap di atas. Kelas menengah sedang menarik uang mereka bukan untuk investasi, tetapi untuk konsumsi harian (*consumption smoothing*).

Data Badan Pusat Statistik (BPS) tentang deflasi beruntun (bulan ke bulan) pada pertengahan 2024 juga menjadi paradoks. Deflasi sering dianggap baik karena harga turun. Namun, jika deflasi terjadi karena sisi permintaan yang melemah rakyat tidak punya uang untuk membeli, itu adalah sinyal resesi daya beli. Penurunan penjualan ritel, lesunya industri otomotif, dan banyaknya gerai ritel modern yang tutup adalah manifestasi nyata dari data "dingin" tersebut. Kelas menengah sedang menahan ikat pinggang sekencang-kencangnya.

PEMBAHASAN

Gaji yang berjalan, Inflasi yang berlari? Mengapa fenomena "Mantab" ini terjadi secara masif? Jawabannya bukan tunggal, melainkan akumulasi dari berbagai tekanan ekonomi (*economic squeeze*).

Pertama, terjadi kenaikan pendapatan riil yang stagnan selama dekade terakhir, kenaikan upah minimum (UMR) dan gaji karyawan swasta rata-rata bergerak lambat, sering kali hanya sedikit di atas inflasi umum (*headline inflation*). Namun, angka inflasi umum sering kali menipu. Inflasi pada sektor kebutuhan dasar kelas menengah seperti pendidikan, kesehatan, dan properti jauh lebih tinggi daripada kenaikan gaji mereka. Biaya uang kuliah tunggal (UKT) melonjak, harga rumah semakin tak terjangkau, sementara slip gaji hanya bertambah sekian persen. Akibatnya, *disposable income* (pendapatan yang siap dibelanjakan) tergerus.

Kedua, berefek pada generasi sandwich pada struktur demografi Indonesia menempatkan kelas menengah dalam posisi terjepit. Mereka harus membiayai anak-anak mereka (biaya sekolah mahal) sekaligus menanggung biaya hidup orang tua mereka yang tidak memiliki dana pensiun memadai. Ketika sistem jaminan sosial negara seperti BPJS Kesehatan/Ketenagakerjaan belum mengcover seluruh aspek kesejahteraan lansia, beban itu jatuh ke dompet anak-anaknya. Tabungan yang seharusnya untuk masa depan, habis dimakan untuk menambal beban ganda ini.

Ketiga, hantaman gelombang PHK dan "*Gig Economy*" pasca-pandemi, struktur ketenagakerjaan berubah. Banyak kelas menengah yang kehilangan pekerjaan formal dan beralih menjadi pekerja sektor informal atau *gig economy* (ojol, kurir, freelancer). Meskipun terlihat bekerja, pendapatan di sektor ini sangat fluktuatif dan tanpa jaminan sosial. Mereka kehilangan status kemapanan, dan "Makan Tabungan" menjadi mekanisme pertahanan satu-satunya saat orderan sepi.

Kebijakan Publik – Kelas Menengah sebagai "Sapi Perah"

Salah satu kritik terkeras dalam fenomena ini tertuju pada arah kebijakan fiskal pemerintah. Indonesia memiliki struktur kebijakan yang sering disebut "Missing Middle" atau Kelas Menengah yang Terlupakan. Masyarakat miskin (Desil 1-2) mendapatkan bantalan tebal berupa Bantuan Sosial (Bansos), BLT, PKH, dan subsidi listrik 450 VA. Masyarakat kaya (Top 1%) menikmati berbagai insentif pajak, tax holiday untuk investasi, dan kemudahan bisnis. Lalu, bagaimana dengan kelas menengah?

Kelas menengah adalah kelompok yang "terlalu kaya untuk dapat Bansos, tapi terlalu miskin untuk bisa santai". Merekalah pembayar pajak yang paling patuh (PPh 21 dipotong langsung dari gaji). Merekalah target utama kenaikan PPN (menjadi 11% dan wacana 12%). Merekalah yang terdampak pencabutan subsidi BBM dan listrik non-subsidi. Setiap kali negara membutuhkan penerimaan, kelas menengah adalah sasaran tembak yang paling mudah. Iuran Tapera, wacana asuransi wajib kendaraan, hingga kenaikan cukai, semuanya menggerogoti daya beli kelompok ini. Tanpa adanya jaring pengaman sosial (*social safety net*) khusus kelas menengah, seperti insentif pajak penghasilan yang lebih progresif atau subsidi transportasi publik yang masif, kelompok ini perlahan-lahan jatuh miskin (*downgrade*) menjadi kelompok rentan miskin.

Jika fenomena Mantab dibiarkan, dampaknya akan menjalar jauh melampaui dompet individu.

1. Perlambatan Ekonomi (Slowdown)

Rumus PDB Indonesia adalah $C + I + G + (X-M)$. Komponen C (Konsumsi Rumah Tangga) menyumbang lebih dari 50%. Jika kelas menengah berhenti belanja barang sekunder dan tersier (elektronik, properti, rekreasi) karena uangnya habis untuk makan, maka industri manufaktur dan jasa akan terpukul. Pabrik mengurangi produksi, PHK bertambah, dan siklus setan deflasi akan tercipta. Target pertumbuhan ekonomi 5-6% akan menjadi mimpi di siang bolong.

2. Ancaman "Middle Income Trap"

Indonesia bercita-cita menjadi negara maju pada 2045. Syarat utamanya adalah memiliki kelas menengah yang kuat dan produktif. Jika kelas menengahnya justru menyusut dan miskin, siapa yang akan menggerakkan produktivitas? Fenomena Mantab adalah gejala awal deindustrialisasi prematur, di mana sektor jasa bernilai rendah mendominasi, sementara daya beli masyarakat tidak cukup kuat untuk menyerap produk industri bernilai tambah tinggi.

3. Krisis Kesehatan Mental dan Sosial

Tekanan finansial berkorelasi lurus dengan kesehatan mental. Generasi muda yang merasa putus asa karena tidak mungkin membeli rumah atau menabung (karena habis untuk Mantab), akan cenderung menunda pernikahan (*marriage delay*) atau enggan memiliki anak (*childfree*). Dalam jangka panjang, ini akan mengubah struktur demografi dan menciptakan masalah sosial baru.

Solusi dan Rekomendasi

Menyelamatkan kelas menengah bukan lagi pilihan, melainkan keharusan mendesak, dari permasalahan tersebut rekomendasi kebijakan yang bisa diterapkan:

1. Reformasi Pajak yang Berkeadilan

Tunda atau batalkan rencana kenaikan PPN 12%. Di saat daya beli lesu, menaikkan pajak konsumsi adalah tindakan "bunuh diri" ekonomi. Sebaliknya, pemerintah perlu memperluas *bracket* (lapisan) pajak PPh 21 agar kelas menengah bawah memiliki lebih banyak ruang napas (*take home pay* lebih besar).

2. Jaring Pengaman Kelas Menengah

Ciptakan skema perlindungan sosial untuk korban PHK kelas menengah (perkuat Jaminan Kehilangan Pekerjaan/JKP). Subsidi tidak harus berupa uang tunai, tetapi bisa berupa subsidi transportasi publik yang radikal (transportasi murah mengurangi pengeluaran bulanan secara signifikan) dan perumahan terjangkau di tengah kota.

3. Kendalikan Inflasi "Non Makanan"

Pemerintah sangat sukses mengendalikan harga cabai dan bawang, tapi gagal mengendalikan biaya pendidikan dan kesehatan. Intervensi negara diperlukan untuk menahan laju inflasi biaya sekolah swasta dan biaya medis yang mencekik.

4. Formalisasi Pekerjaan

Dorong re-industrialisasi padat karya. Pekerjaan formal dengan gaji tetap dan jaminan sosial adalah obat terbaik untuk penyakit "Makan Tabungan". Sektor *gig economy* tidak boleh menjadi sandaran utama penyerapan tenaga kerja.

PENUTUP

Fenomena "Mantab" adalah jeritan diam dari jutaan rakyat Indonesia yang sedang berjuang mempertahankan martabat hidupnya. Mereka tidak meminta belas kasihan berupa sembako gratis. Mereka hanya menuntut lingkungan ekonomi yang adil: di mana kerja keras dihargai dengan pendapatan yang layak, di mana pajak yang dibayar kembali dalam bentuk layanan publik yang memadai, dan di mana tabungan adalah untuk masa depan, bukan untuk menyambung nyawa hari ini. Menyelamatkan tabungan kelas menengah, sejatinya adalah menyelamatkan masa depan ekonomi Indonesia.

REFERENSI

- Kompas.id. (2025, Agustus 6). *Upah Riil Stagnan, Tabungan Menipis: Ancaman Ketahanan Rumah Tangga Pekerja*. Kompas. <https://www.kompas.id/artikel/upah-riil-stagnan-tabungan-menipis-ancaman-ketahanan-rumah-tangga-pekerja>
- Kompas.com. (2025, Agustus 7). *Laporan LPEM UI: Upah Riil Mandek, Daya Beli Tergerus*. Kompas. https://money.kompas.com/read/2025/08/07/060000226/laporan-lpem-ui--upah-riil-mandek-daya-beli-tergerus?page=all&utm_source=Google&utm_medium=Newstand&utm_campaign=partner#google_vignette
- Bisnis.com. (2025, Juli 28). *Survei MSI: Masyarakat Makan Tabungan Demi Tetap Belanja saat Libur Sekolah 2025*. Bisnis. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20250728/9/1896932/survei-msi-masyarakat-makan-tabungan-demi-tetap-belanja-saat-libur-sekolah-2025#:~:text=Survei%20Mandiri%20menunjukkan%20bahwa%20masyarakat%20makan%20tabungan%20untuk%20belanja%20saat%20libur%20sekolah%202025.>
- Kumparan.com. (2025, Mei 19). *Mandiri Institute Catat Indeks Tabungan Kelas Bawah per Mei 2025 Turun*. <https://kumparan.com/kumparanbisnis/mandiri-institute-catat-indeks-tabungan-kelas-bawah-per-mei-2025-turun-256EKuy54Wp>